DOMINASI MURTAHIN TERHADAP RAHIN PADA PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA ANGOHU KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE

Uswatun Khoiriyah, Husain Insawan, Umi Rohmah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article aims to determine the practice of dominating murtahin against rahin in the practice of pawning fields in Anggothu Village, Tongauna District, Konawe Regency. This study focuses on the forms and motives of the domination of murtahin against rahin in the practice of pawning fields in Anggothu Village, Tongauna District, Konawe Regency. And how is the review of Islamic law on the practice of dominating murtahin to rahin in the practice of pawning fields in Anggothu Village, Tongauna District, Konawe Regency. Land or rice fields in the community not only function as a productive asset, but also function as a transactable commodity such as buying and selling, leasing, lending and borrowing, according to community needs which often cause various problems in practice. The implementation of the paddy pawning practice in Anggothu Village, Tongauna District, Konawe Regency has not fulfilled the pillars and conditions of the pawning contract perfectly, and has not yet reached the harmonious and validity requirements of the contract described in Islamic law. In the practice of pawning paddy fields, it is found a form of exploitation which is manifested in the form of domination or control physically and non-physically by those who have power in capital (capital), with the aim of exploiting the object of the pledge by murtahins. In its implementation, it requires compensation for services or other forms that can cause loss to one of the parties. After studying and analyzing it through Islamic business law, this is not allowed even though the results obtained are only a few, because in its use it intends to extract benefits that can be multiple and detrimental to one party. Jumhur ulama 'allows taking the benefits, but only as a substitute for maintenance and storage costs, because if the borrowing and lending activity requires taking benefits it can be categorized as usury.

Keywords : Domination, Pawn, Islamic Business Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik dominasi murtahin terhadap rahin pada praktik gadai sawah di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Kajian ini memfokuskan pada bentuk dan motif dominasi murtahin terhadap rahin pada praktik gadai sawah di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dominasi murtahin kepada rahin dalam praktik gadai sawah di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Lahan atau persawahan di masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai aset produktif, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktiknya. Pelaksanaan praktik gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tersebut belum memenuhi rukun dan syarat akad gadai secara sempurna, dan belum mencapai

rukun dan syarat keabsahan akad yang dijelaskan dalam hukum Islam. Dalam praktik gadai sawah tersebut ditemukan bentuk eksploitasi yang diwujudkan dalam bentuk dominasi atau penguasaan secara fisik dan non fisik dari pihak yang memiliki kekuasaan dalam modal (kapital), dengan tujuan pemanfaatan objek gadai oleh murtahin. Dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya imbalan jasa maupun bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Setelah dikajian dan analisis melalui hukum bisnis Islam hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasil yang diperoleh hanya sedikit saja, karena dalam pengambilannya bermaksud untuk menarik manfaat yang dapat menguntungkan yang berlipat ganda serta merugikan sebelah pihak. Jumhur ulama' memperbolehkan mengambil manfaatnya, akan tetapi hanya sekedar pengganti dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan, karena apabila kegiatan pinjam-meminjam mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai riba.

Kata Kunci : Dominasi, Gadai, Hukum Bisnis Islam

A. Pendahuluan

Lahan atau sawah pada masyarakat umumnya tidak hanya berfungsi sebagai aset produktif, akan tetapi juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan gadai, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak jarang sering menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktiknya. Misalnya, pemanfaatan tanah sebagai objek gadai di Desa Baruga¹ dan sawah dijadikan objek gadai di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.²

Gadai yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum sesuai dengan hukum Islam sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan eksploitatif dan sebagainya. Kebanyakan mereka hanya mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan kerugian atau konsekuensi yang jauh dari prinsip tolong menolong (ta'awun). Padahal dalam Islam sudahlah jelas tentang tata cara dalam mu'amalah yang mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Ma'idah/5:2 Terjemahnya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*³

¹ Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Tanah : Studi Kasus di Kelurahan Baruga*. (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakshiyah Sultan Qaimuddin Kendari, 2010), h.56-57.

² Isti'anah, *Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal*, (Skripsi Sarjan, Jurusan Syari'ah Progam Studi Mu'amalah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009). h.79.

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Mekar Surabaya, 204), h. 142.

Merujuk ayat di atas, sebagai salah satu rekomendasi agar saling tolong menolong antar sesama dalam kebaikan dan tidak saling tolong menolong dalam hal keburukan. Dengan demikian segala praktik dalam mu'amalah khususnya gadai tersebut dapat sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan mencapai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam. Atas dasar itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan sedekah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi.

Problematika yang muncul saat ini adalah terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, yakni antara realitas dan peraturan yang ada khususnya dalam aturan Islam yang masih cukup pelik untuk dipecahkan karena telah membudaya di tengah masyarakat. Akibatnya, mereka membenarkan hukum tersebut, dan terjadi main hakim sendiri yang dapat merugikan dan menguntungkan pada salah satu pihak saja tanpa melihat prinsip-prinsip sosial apalagi prinsip ekonomi serta jauh dari kemaslahatan, khususnya pada lokasi penelitian di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Kesenjangan sosial terjadi di ranah ekonomi khususnya dalam masalah gadai yang menggunakan bentuk eksplotatif bagi para penguasa atau seorang yang memiliki kekuasaan dalam kapital serta strata ekonomi yang lebih tinggi untuk melakukan dominasi terhadap pihak yang lemah.

Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk eksploitatif dapat muncul dari kekuasaan yang tampak dalam bentuk pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang. Kekuasaan merupakan bagian setiap orang, baik sebagai orang tua, guru, buruh, warga negara, tetangga, rakyat, ataupun Presiden. Kekuasaan ada di mana-mana, kekuasaan hadir disaat manusia melakukan interaksi sosial dengan sesama. Dengan kharismanya dan kekuasaannya itu, ia dapat mengatur dan mengendalikan seseorang. Di lain pihak, kekuasaan seseorang cenderung disalahgunakan untuk menguasai dan melakukan dominasi (penguasaan) terhadap mereka yang lemah. Seperti halnya pada kondisi lokasi yang penulis teliti terdapat beberapa kalangan yang salah dalam menginterpretasikan kekuasaan dan kemampuan ekonomi yang dimilikinya yaitu dalam bermu'amalah khususnya pada transaksi gadai di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Kekuasaan tersebut sudah mutlak menjadi tujuan pada dirinya sendiri, seperti mencari keuntungan yang dapat merugikan orang lain atau sepihak, hal tersebut tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan bersama sebagai makhluk sosial yang saling tolong

menolong. Kasus seperti ini sering terjadi di dalam kelas sosial dan strata ekonomi masyarakat. Di dalam Islam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bathil dan Allah SWT telah melarangnya.

Kemaslahatan yang diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan selayaknya diwujudkan pula pada praktik gadai yang sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi dan bisnis Islam. Praktik gadai yang terjadi di Desa Anggohe Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe yang menarik adalah fakta adanya tindakan eksploitatif dengan menguasai objek dan pemanfaatan objek gadai oleh pihak penerima gadai (murtahin). Masyarakat yang tradisional melakukan praktik gadai berdasarkan tradisi yang berlaku di masyarakat, yang meliputi bentuk-bentuk dan motif dominasi pada praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tersebut.

B. Pembahasan

1. Praktik dominasi Murtahin terhadap Rahin pada praktik gadai sawah di desa Anggohe

Dominasi diartikan sebagai penguasaan, oleh yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga dsb), penempatan posisi bagus dan kuat; pengaruh besar. Dapat kita temukan bahwa dalam struktur kelas masyarakat terdapat suatu kelas yang lebih dominan atas status kelas lain untuk menjalankan suatu bentuk kekuasaan yang tidak wajar berupa dominasi, yaitu penguasaan oleh seseorang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, eksploitasi terhadap kekuasaan yang tidak wajar. mengontrol atau mengambil keuntungan secara tidak benar. Ini terjadi di bidang ekonomi, tetapi bisa terjadi di bidang politik, militer, dan lainnya. Kita bisa melihat bahwa dominasi kekuasaan selalu ada dalam sistem sosial. Dalam studi hukum bisnis Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya di mana ada aturan halal dan haram.⁴

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu Ar- Rahn yang berarti الرَّهْنُ - الدَّوَامُ (*ats- tsubut – Ad-dawam*) yaitu tetap dan terus menerus. Imam As- Syaikani mengatakan bahwa *rahn* (*gadai*) adalah *Al-Ihtihabsy* yang berarti menahan.⁵ Definisi *rahn* menurut istilah terminologi *rahn* berarti

⁴ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 571.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'amalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007). h.105.

menilai suatu barang atas dengan harga tertentu atas suatu utang, yang dimungkinkan pembayaran uang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut. Sedangkan gadai dalam Islam disebut *Rahn*. *Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam *fiqih* dikenal dengan akad *ar-rahn* diartikan sebagai "suatu akad di mana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya".⁶ Maksudnya bahwa dalam hal ini si peminjam (*rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambilnya dari si pemberi pinjaman (*murtahin*). Dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan kegiatan menjaminkan suatu barang/benda yang memiliki nilai (harta benda) atas pinjaman yang diambil (*rahin*), untuk ditahan dan disimpan oleh orang yang memberikan pinjaman (*murtahin*) sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam (*rahin*) tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diambilnya maka si pemberi pinjaman (*murtahin*) berhak melakukan penjualan atas barang jaminan (tentunya dengan kesepakatan bersama *rahin*), hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengganti pinjaman, jika masih terdapat yang lebih maka diberikan kepada si peminjam (*rahin*), dan jika hasil penjualan kurang dari jumlah pinjaman maka kekurangan tersebut ditanggungkan kepada si peminjam.

Mengenai praktek gadai sawah, asal usul akad gadai adalah tabarru 'atau sedekah, yaitu membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta dan bentuk lainnya, sehingga akad gadai dijadikan alternatif bagi seseorang yang membutuhkan dana atau uang dengan menjadikan hartanya sebagai jaminan demi mendapatkan kepercayaan dan bukan bertujuan untuk menumbuhkan kekayaan dan mencari keuntungan. dalam masyarakat Anggoahu masih tetap mengadakan gadai menggadai bila ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dan inilah yang merupakan sebuah masalah yang perlu mendapat perhatian. Alasan penduduk Desa Anggoahu melakukan gadai menggadai sangat beragam yakni sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain praktik menggadaikan sebagai alternatif dalam menghadapi situasi darurat, ternyata gaya hidup juga mempengaruhi relasi sosial di masyarakat yang berakibat pada praktik menggadaikan. Praktik menggadaikan sangat menjanjikan dan dapat dijadikan sebagai investasi

⁶Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah "Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 182.

atau modal, sehingga arus persaingan usaha terus meningkat di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. dengan melakukan gadai seseorang bisa mengolah sawah lebih luas lagi karena hasil dari modal pinjaman yang diperoleh melalui gadai tersebut dapat digunakan untuk bisnis yang lain seperti sewa menyewa sawah dan lain-lain. Biasanya alternatif dari gadai ini dilakukan dengan sistem jaminan sertifikat ditambah pemberian bonus setiap panennya, pengalihan hak pengolahan sawah oleh penerima gadai (*murtahin*), dan ada juga gadai sawah tanpa sertifikat akan tetapi dengan perjanjian pembagian 1/3 % hasil panen kepada *murtahin*. Oleh karena itu penulis mencoba menyumbang saran sesuai kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas sebagai alternatif pemecahannya.

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh terkait praktik dominasi *murtahin* terhadap *rahin* dapat dilihat dari beberapa sisi seperti bentuk dominasi dan motif dominasi, serta analisis hukum bisnis Islam tentang dominasi terhadap dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah di desa Anggothu kecamatan Tongguna Kabupaten Konawe. Dalam bidang pertanian seperti halnya praktik gadai sawah di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Adapun prosedur dari pelaksanaan transaksi gadai sawah tersebut dilakukan dengan lisan maupun juga tulisan, namun yang berlaku saat ini kebanyakan menggunakan tulisan atau hitam di atas putih yang memuat data-data otentik seperti materai dan surat perjanjian sebagai penguat kepercayaan guna menjamin kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Proses legitimasi dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi dan bentuk, termasuk praktik penguasaan sawah oleh oleh *murtahin* kepada *rahin* yang “terpaksa” disepakati dan dipatuhi oleh *rahin*. Bentuk-bentuk dominasi tersebut terbagi dalam empat pembahasan yaitu: ungkapan pilihan, eksploitasi lahan sawah, pengalihan hak pengolahan sawah, menegaskan kekuasaan secara materil, dan menegaskan strata sosial.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe

Terjadi interpretasi yang saling berbeda dalam memahami segala aktivitas yang dilakukan, khususnya dalam memahami sistem praktik gadai menurut hukum bisnis Islam yang terjadi di Desa Anggothu Kecamatan Tongaun Kabupaten Konawe.

a. Gadai pengolahan sawah

Salah satu bentuk gadai yang terdapat di Desa Anggothu ialah gadai dengan sistem jaminan sawah yang diolah sepenuhnya oleh *murtahin*. Model gadai seperti ini yang biasanya

diminati oleh seseorang yang bermodal untuk mencari keuntungan yang berlipat ganda. Ironinya lagi, apabila si *rahin* tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjaman dari *murtahin*, maka objek gadai tersebut akan terus diolah oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut tanpa adanya bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*. Dengan adanya bentuk dominasi yang bermuara pada sifat *eksploitatif* dalam transaksi maka Islam melarang, sehingga dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik antara sesama manusia hal tersebut dapat menyimpang dari Syari'at Islam karena dapat menimbulkan suatu i'tikad yang tidak baik yang dapat menghilangkan faedah dari akad *tabarru'* dalam *mu'amalah* khususnya dalam praktik gadai menggadai.

b. Gadai sertifikat

Bentuk gadai dengan sertifikat ini, biasanya juga terjadi apabila *rahin* tidak mengizinkan sawahnya untuk diolah oleh *murtahin* maka kemudian yang menjadi objek gadai tersebut ialah dengan menyerahkan sertifikat sawah ditambah pemberian hasil panen kepada *murtahin* sesuai hasil panen yang diperoleh. Islam tidaklah membenarkan bentuk praktik gadai yang demikian karena mengambil harta atau hak milik orang lain dengan cara yang *bathil*, yang tentunya merugikan salah satu pihak serta tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dalam melakukan *mu'amalah*.

1) Permintaan bersyarat

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) maupun oleh penerima gadai (*murtahin*), kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan hak penggadai terhadap barang hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatannya/memungut hasilnya. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya.

Berdasarkan ketentuan gadai tersebut di atas, maka jika barang gadaian itu berupa kendaraan roda dua atau empat, binatang ataupun tanah misalnya tanpa izin pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadai itu. Ketentuan demikian itu bisa bertentangan dengan prinsip Islam dalam hak milik, yaitu bahwa hak milik pribadi itu tidak mutlak tetapi berfungsi sosial, sebab harta benda itu pada hakekatnya milik Allah. Sebagaimana

Q.S an-Nur:33 yang merupakan amanat bagi orang yang memilikinya. Oleh karena itu diusahakan agar didalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika penggadai minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama (*production of sharing*). Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari harta benda yang tidak berfungsi.⁷

Berdasarkan ketentuan hukum gadai di atas, maka Islam tidak membenarkan adat istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan penggadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya diambil oleh penggadai, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pihak pemilik barang gadai. Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai di mana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut sering terjadi dalam masyarakat di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna, misalnya dalam praktik gadai yang menggunakan sawah dan sertifikat sawah sebagai barang jaminannya yang diolah oleh penerima gadai (*murtahin*), dan pemberian bagi hasil setiap kali panen sehingga secara otomatis hasilnya dapat dimanfaatkan sebagian maupun sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, di mana sawah yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah (pemberi gadai/ penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan tersebut dianggap sebagai milik penerima gadai sampai piutang yang diambil oleh pemberi gadai dikembalikan. Berkenaan dengan pemanfaatan objek gadai *marhun* dalam hal ini berikut pendapat dari Imam Madzhab

Ulama ‘	Pendapat	Illat/reasoning	Dalil
Imam Syafi’i	Tidak Membolehkan	Semua manfaat barang gadaian adalah bagi <i>rahin</i> , karena barang gadai hanya sebagai jaminan kepercayaan atas <i>murtahin</i> , yang merupakan amanah bagi <i>murtahin</i> sehingga tidak wajib meminta kecuali jika melewati batas	لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung:Al-Ma’arif), h. 56-58

		normal.	
Imam Maliki	Tidak Membolehkan	Mendasarkanya pada setiap utang yang menarik manfaat termasuk riba. Yang dapat memanfaatkan <i>marhun</i> ialah <i>rahin</i> , akan tetapi <i>murtahin</i> pun dapat memanfaatkan <i>marhun</i> dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.	كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ الرِّبَا (Q.S al- Hadid:18) (al Baqarah :188)
Imam Hambali	Tidak Membolehkan	Harus dengan izin <i>rahin</i> dengan tidak mengurangi nilai <i>marhun</i> , dan itu hanya sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatan.	الضَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ وَيَشْرَبُ لَبَنُ الدَّرَادِكَا نَ مَرَهُونَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)
Imam Hanafi	Membolehkan	Objek gadai (<i>marhun</i>) memerlukan biaya untuk pemeliharaan.	الضَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ وَيَشْرَبُ لَبَنُ الدَّرَادِكَا نَ مَرَهُونَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)
Jumhur Ulama'	Tidak membolehkan	Tidak ada adat istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan pemegang gadai (<i>murtahin</i>) menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab hal tersebut mengandung unsur eksploitasi dan sebagainya. Dalam ajaran Islam saat melakukan transaksi atau perjanjian pada setiap pihak yang melakukan kesepakatan lebih baik menghindari <i>mafsadah</i> dari pada meraih <i>mashlahat</i> .	دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Melalui beberapa pendapat *madzab* di atas dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas ulama' sepakat bahwa tidak membenarkan penarikan atau pengambilan manfaat atas objek gadai yang dapat menimbulkan kerugian sepihak, apalagi hingga mengandung unsur eksploitasi, hal itu bisa terjadi kecuali mendapat izin dari pemilik barang gadai (*rahin*). Ulama' memperbolehkan mengambil manfaat barang gadaian akan tetapi hanya sekedar upah atau biaya perawatan dan pemeliharaan objek gadai (*marhun*) tersebut apabila berupa kendaraan dan hewan yang dikendarai serta dapat diperah susunya, akan tetapi menurut ulama' Hanafiyah tidak dibenarkan memanfaatkan barang gadai yang jika dilakukan akan dapat menimbulkan *kemudharatan* dan merugikan salah satu pihak sehingga menghilangkan faedah dari prinsip akad gadai. Adapun mengenai boleh tidaknya barang gadai atau objek gadai diambil manfaatnya beberapa ulama' di atas berbeda pendapat. Dari kesekian perbedaan pendapat *madzab* sebenarnya ada titik yang mengarah dan menuju pada kesamaan dari pendapat mereka. Inti dari kesamaan pendapat *madzab* tersebut terletak pada pemanfaatan barang gadaian yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara', namun apabila pemanfaatan barang tersebut telah mendapat izin kedua belah pihak dan saling rela, maka pemanfaatan objek gadai tersebut diperbolehkan

C. PENUTUP

Dalam praktik dominasi yang terjadi di lapangan *murtahin* melakukan tindakan dominasi terhadap *rahin* melalui praktik gadai sawah, sehingga praktik gadai yang tolong menolong berubah menjadi pengambilan keuntungan sepihak. Tindakan *murtahin* dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu, keinginan untuk mencari keuntungan yang besar dan di dalam strata sosial. sehingga menimbulkan beberapa ungkapan yang memaksa dan sebagainya.

Berdasarkan kajian dan analisis hukum bisnis Islam terhadap dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah masih jauh dari ketentuan syari'at Islam yang berorientasi pada prinsip-prinsip nilai etika dan moral dalam bisnis yang telah dibangun Rasulullah saw, sehingga menciptakan terjadinya bentuk-bentuk eksploitatif dan pemerasan secara ekonomis. Hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasil yang diperoleh hanya sedikit saja, karena dalam pengambilannya bermaksud untuk menarik manfaat yang dapat menguntungkan, berlipat ganda serta merugikan sebelah pihak. Jumhur ulama' membolehkan pengambilan manfaat, kecuali hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan penyimpanan, karena apabila kegiatan pinjam-meminjam mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasuki, HA. Hafizh, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, FIK-IMA : PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Mua'amalah*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Antonio, Muh. Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah "Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, t.th, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Mekar Surabaya, 2004.
- Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Tanah : Studi Kasus di Kelurahan Baruga*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakshiyah Sultan Qaimuddin Kendari, 2010.
- Isti'anah, *Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal*. Skripsi Sarjan, Jurusan Syari'ah Progam Studi Mu'amalah Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Jogjakarta. 2009.